

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MELALUI PROSES ARBITRASE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sulis Setiawati¹, Rahmatul Huda², Parman Komarudin³.

¹Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM.18500003

²Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK.061701974

³Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK. 061310074

Email sulissetiawatisulis40@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, dan informatika turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan jasa di suatu negara. Kondisi ini sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan semakin terbuka lebar untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya. Namun dalam kenyataannya, pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perselisihan diantara mereka. Hal inilah yang menjadi titik awal mulanya sengketa. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan penyelesaian Sengketa Konsume (BPSK) Kota Banjarmasin; dan 2) Untuk menganalisis Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui proses arbitrase perspektif hukum Islam. Metode penulisan yang dipakai untuk Menyusun skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan serta wawancara yang dilakukan dengan Majelis BPSK Kota Banjarmasin yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan: 1) Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin terhadap pengambilan BPKB di BPSK Kota Banjarmasin penyelesaiannya melalui proses arbitrase; dan 2) Penyelesaian sengketa Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam melalau proses arbitrase dengan akad *tahkim*.

Kata Kunci: *Penyelesain Sengketa, BPSK, Arbitrase, Perspektif Hukum islam.*

ABSTRACT

Advances in the field of science and technology of communication, and informatics also support the expansion of the space for goods and services transactions in a country. This condition is very beneficial for the interests of consumers and business actors because the need for the desired goods and services can be met and is increasingly wide open to choose various types of quality goods and services according to their abilities. But in reality, the fulfillment of rights and obligations between the two parties is often overlooked, causing disputes between them. This is the starting point for the dispute. This study aims to: 1) To determine the settlement of consumer disputes by Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen or Costumer's Conflict Resolution Board (BPSK) in Banjarmasin; and 2) To analyze the Settlement of consumer disputes by Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen or Costumer's Conflict Resolution Board (BPSK) through an arbitration process from an Islamic legal perspective. The writing method used to compile this thesis was a normative legal research method. This research data was obtained from literature research and interviews conducted with the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen or Costumer's Conflict Resolution Board (BPSK) Banjarmasin which was processed and analyzed qualitatively to obtain descriptive results. Based on the results of data analysis, it could be concluded: 1) Dispute resolution of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen or Costumer's Conflict Resolution Board (BPSK) in Banjarmasin against the taking of BPKB in BPSK Banjarmasin was resolved through arbitration proceedings; and 2) Consumer dispute resolution in the Perspective of Islamic Law through arbitration proceedings with a tahkim agreement.

Keywords: *Dispute Resolution, BPSK, Arbitration, Islamic Law Perspectives*

DAFTAR PUSTAKA

- AZ. Nasution. (2003). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta Universitas Indonesia.
- Abdul Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dewi Tuti Muryati. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*.
- Frans Hendra Winarta. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 184-196.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2018). Penanganan Non-Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 1-9.
- Jejen Musfah. (2016). *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan. (2011). *Hukum perlindungan Konsumen*. Malang: Tim UB Press.
- Komarudin, P. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Non Ligitasi. *AL-IQTISHADIYAH: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(1), 87-105.
- KBBI, (2022, Juni 10). <http://kbbi.com.id/arti-kata/sengketa>. Di akses pada 10 Juni 2022 pukul 10:30 Wita.
- Nurmaningsih Amriani. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rizqi Zulmira (2022, Juni 20) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- Salim & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sophar Maru Hutagalung. (2014). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufaka*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- JDIH BPK RI. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Diakses pada 25 Juni 2022 pukul 10:30
- Yusuf Shpffie. (2003). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegak Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainudin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.